Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 6 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

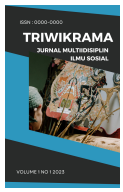

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DI DESA GLINGSERAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO

Rafi Maulana Hardi[1], Ria Angin[2]
Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2024
Revised Juli 2024
Accepted Juli 2024
Available online Juli 2024

e-mail:
rafimaulanah77@gmail.com,
ria.angin@unmuhjember.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pangan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan . Pemberian makanan tambahan ini juga bertujuan untuk mengurasi resiko terjadinya stunting. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle, terkait isi kebijakan dan konteks implementasi tidak semua terbukti. Implementasi kebijakan tidak semua terimplementasi dengan baik. Ketika teori Grindle digunakan dalam penelitian ini tentang program pemberian makanan tambahan atau PMT- tidak menggambarkan dinamika yang ada.Berdasarkan hasil analisa data pada penelitian, disimpulkan bahwa implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT-) berjalan dengan baik.Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pengimplementasian program pemberian makanan tambahan (PMT-)
Kata Kunci : Implementasi, PMT-, Gizi

ABSTRACT

The Local Food-based Supplementary Feeding Program, hereinafter referred to as Local Food-based PMT, is a local food supplement provided to improve the nutritional status of targets. Local food-based supplementary feeding (PMT) is local food supplementary feeding provided to improve the nutritional status of targets. Local food is food consumed by the local community in accordance with the potential of local resources and wisdom. The provision of local food-based supplementary food also aims to reduce the risk of stunting. The purpose of this study was to explain the implementation of the local food-based supplementary feeding program in Glingseran Village, Wringin Sub-district, Bondowoso Regency.The research used a qualitative descriptive method. This research uses Merilee S Grindle's policy implementation theory, related to the content of the policy and the implementation context, not all of which are proven. Policy implementation is not all well implemented. When Grindle's theory is used in this research on the local food-based supplementary feeding program or PMT-, it does not describe the dynamics that exist. Based on the results of data analysis in the study, it was concluded that the implementation of the local food-based supplementary feeding program (PMT-) went well. However, there are still some obstacles or constraints in implementing the local food-based supplementary feeding program (PMT-).
Keywords: Implementation, PMT-Local, Nutrition.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 6 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. Pendahuluan

Stunting menjadi salah satu masalah yang terjadi pada balita di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia (Supriyantoro, 2022). Stunting menjadi masalah yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang cukup dalam jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada balita, sehingga menyebabkan tinggi badan anak terhambat atau lebih rendah dibanding anak-anak seusianya. Stunting juga membawa dampak pada perkembangan otak pada balita dalam jangka panjang yang menyebabkan gangguan kesehatan mental, perkembangan intelektual serta konitif, dan risiko serangan penyakit kronis.

Jumlah anak stunting pada tahun 2020 sebanyak 149,2 juta, lebih rendah dibanding tahun 2000 sebanyak 203,6 juta dan menurun hingga 26,7%. Penurunan angka stunting ini dialami secara global, namun tidak merata di seluruh Kawasan, di wilayah Kawasan Asia dan Eropa mengalami penurunan namun di Kawasan Afrika dan Timur Tengah masih terdapat kenaikan (Jayani, 2021). Adapun Prevalensi stunting di Indonesia, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,8% yaitu dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Tingkat stunting di Indonesia memang telah mengalami penurunan daritahun ke tahun, namun angkanya masih tergolong tinggi. Stunting di daerah pedesaan bahkan cenderung lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akses yang terbatas terhadap gizi yang baik, sanitasi yang masih buruk, pengetahuan masyarakat yang rendah tentang stunting, serta praktik kesehatan yang kurang memadai.

Hasil Survei Status GiziIndonesia (SSGI) KementerianKesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jawa Timur mencapai 19,2% pada 2022. Provinsiini menduduki peringkat ke-25 dengan prevalensi balita stuntingtertinggi di Indonesia tahun lalu (SSGI,2022) di jawa Timur pada tahun 2022 berhasil menurunkansekitar 3 % angka stunting. DiProvinsi Jawa timur, salah satu Kabupaten yang cukup tinggi angkastunting adalah Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut diindikasikan bahwa dariangka stunting atau balita kuranggizi di wilayah Bondowoso tergolong cukup tinggi. Diperlukan penanganan khusus, sebagai upaya penanganan penurunan stunting pada tahun2022-2024 dan hal ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah yakni dengan program pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil semakin meningkat melalui beberapa peraturan terkait yakni Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/1622/2023 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Pemberian Makanan Tambahan . Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan stunting dan meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil agar terhindar dari resiko terjadinya stunting dengan menetapkan berbagai kebijakan dan program yang harus diimplementasikan.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pangan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempatsesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan dan menjadialternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, Desa Glingseran, yang terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sebelumnya belum cukup efektif dalam mengatasi masalah gizi

buruk di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil di Desa Glingseran untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan upaya dengan melibatkan pemerintah desa dalam mendukung pencegahan stunting.

Peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan program pemberian makanan tambahan untuk mencegah terjadinya stunting di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan bagaimana penerapan kebijakan dengan judul "Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso". Penelitian ini akan mengetahui Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

2. Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan. Tachjan secara etimologi mengatakan implementasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat atau sarana untuk mendapatkan hasil (Tachjan, 2006, hal. 24).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis, berbeda dengan perumusan kebijakan yang pada dasarnya teoritis (Dunn, 2003, hal. 132). Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam artian pelaku negara yaitu pejabat dan pemerintah/ swasta yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan (Horn, 1975). Gunn dan Hogwood mengemukakan bahwa implementasi sesuatu yang sangat penting dari suatu masalah manajerial (Gunn, 2003). Sementara Nugroho mendefinisikan implementasi sebagai usaha atau upaya dalam melaksanakan suatu keputusan kebijakan (Dwidjowijoto, 2006).

Berdasarkan pengertian dan pendapat mengenai implementasi kebijakan publik di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang memiliki esensi dalam proses kebijakan publik. Implementasi menjadi tahapan atau proses yang sangat krusial atau penting dalam proses kebijakan publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik meliputi proses penyusunan (formulasi), pelaksanaan (implementasi), dan pengukuran (evaluasi). Pelaksanaan kebijakan publik atau proses implementasi merupakan sesuatu yang bersifat penting atau krusial. Pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan haruslah dipersiapkan dengan matang rencana dan tujuan serta dampaknya.

Istilah kebijakan digunakan oleh pemerintah dan para aktor atau perilaku Negara dalam konteks kegiatan atau sebuah tindakan. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian konsep atau asas yang digunakan sebagai garis dasar dalam pelaksanaan kegiatan, kepemimpinan, serta cara dalam bertindak. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan yaitu suatu tindakan seseorang atau kelompok yang dilakukan untuk memecahkan masalah (Anderson, 1984). Parsons juga memberikan pendapat mengenai kebijakan, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau rencana yang memiliki tujuan politik (Parsons, 2006, hal. 15).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai kebijakan, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan, kegiatan, atau keputusan yang diambil oleh seseorang, sekelompok orang, pemerintah maupun pelaku Negara untuk memberikan solusi dalam memecahkan suatu masalah tertentu, atau untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berupa sebuah peraturan

yang memiliki dampak terhadap sekelompok orang atau masyarakat. Kebijakan paling tidak memuat tiga elemen penting yaitu apa dan bagaimana kebijakan publik tersebut, siapa pelaku kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan tersebut.

Model Implememtasi Kebijakan Publik

Model George C. Edward III (1980)

Edward III mengemukakan terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama, faktor

Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn mengatakan ada enam variabel yang dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan sikap para pelaksana.

Model Merilee S. Grindle (1980)

Grindle mengatakan implementasi kebijakan dapat berlangsung apabila tujuan dan sasaran, program-program kegiatan sudah dirancang dan dirinci sebelumnya, serta sejumlah dana sudah dialokasikan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut.

Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan implementasi kebijakan yang ideal membutuhkan seperangkat kondisi yang optimal. Model ini dipetakan bersifat dari atas ke bawah atau sentralistis dan lebih berada di mekanisme paksa dibandingkan mekanisme pasar. Implementasi kebijakan dengan sifat sentralistis ini dapat menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat yaitu: 1) adanya tujuan yang jelas dan konsisten, 2) memiliki teori kausal yang memadai mengenai bagaimana cara melahirkan perubahan, 3) memiliki struktur implementasi yang tersusun secara legal, 4) para pelaksana implementasi yang mempunyai komitmen dan keahlian, 5) adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa, dan 6) adanya perubahan pada kondisi sosio ekonomi yang tidak membuat lemah dukungan kelompok dan penguasa (Daniel A. Mazmanian, 1983).

Model Charles O. Jones (1970)

Jones mengatakan terdapat tiga aktivitas yang dapat memengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan).

Model Warwick

Model implementasi kebijakan dari Warwick menurutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut para ilmuwan di atas, maka peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980) sebagai teori yang digunakan pada penelitian ini. Model implementasi kebijakan Grindle yang melihat suatu keberhasilan kebijakan berdasarkan isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan yang lebih menampilkan kondisi luar (eksternal) dari pembuat kebijakannya, serta melihat *outcomes* atau pencapaian pada hasil akhir. Sedangkan beberapa model implementasi kebijakan lainnya, pada hemat peneliti relatif kurang tepat karena fokusnya pada organisasi pelaksana kebijakan lebih cenderung membahas implementasi kebijakan di dalam lingkungan organisasi tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti berusaha mencari tahu pelaksanaan atau penerapan program pemberian makanan tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan

pada paham *postpositivisme*, yang digunakan untuk melakukan penelitian yang alamiah dengan teknik pengumpulan data secara gabungan (triangulasi), analisis data yang bersifat induktif atau deduktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna secara umum (Sugiyono, 2013, hal. 9). Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti berusaha mencari tahu pelaksanaan atau penerapan program pemberian makanan tambahan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin. Penelitian ini dilakukan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan waktu penelitian memperoleh data selama satu bulan.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Glingseran, Tenaga Kesehatan Puskesmas Wringin meliputi petugas Gizi Puskesmas Wringin, Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Wringin dan Bidan Wilayah. Penelitian ini dilakukan di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan waktu penelitian memperoleh data selama satu bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data akan di reduks, disajikan dan ditarik kesimpulan, serta terakhir dilakukan keabsahan data

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Peneliti menemukan beberapa ketidaksesuaian teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang diterapkan dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT-). Pada isi kebijakan (*Content of Policy*) yang memuat indikator kepentingan yang memengaruhi sepenuhnya masih belum lengkap apabila tidak disusun khusus peraturan terkait oleh Pemerintah Desa Glingseran, dan sumber daya yang digunakan masih belum terurai dengan jelas dan masih belum terdapat sumber daya berupa anggaran khusus dari Pemerintah Desa Glingseran. Sedangkan dalam konteks atau lingkungan implementasi (*Context of Implementation*) yang memengaruhi proses implementasi kebijakan yang memuat kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap beberapa mengalami kelemahan yang belum selesai akibat faktor masyarakat yang juga sebagai sasaran pelaksana pogram PMT- ini dan komitmen salah satu pelaksana program yakni terkhusus Pemerintah Desa Glingseran sendiri tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progam PMT- ini kepada masyarakat. Program ini tidak akan mengalami peningkatan apabila terdapat faktor yang menghambat tujuan dari program PMT- ini. Grindle juga mengemukakan bahwa hasil implementasi dapat dilihat dari tujuan yang tercapai, *outcomes* atau efek pada masyarakat, dan perubahan serta penerimaan oleh masyarakat.

5. Simpulan

. Stunting menjadi masalah yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang cukup dalam jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada balita, sehingga menyebabkan tinggi badan anak terhambat atau lebih rendah dibanding anak-anak seusianya. Stunting juga membawa dampak pada perkembangan otak pada balita dalam jangka panjang yang menyebabkan gangguan kesehatan mental, perkembangan intelektual serta konitif, dan risiko serangan penyakit kronis.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pangan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempatsesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan dan menjadialternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.Pemberian

Makanan Tambahan Berbahan Pangan yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan adalah makanan tambahan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran.

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberian makanan tambahan berbasis (PMT-) berjalan dengan baik.Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pengimplementasian program pemberian makanan tambahan berbasis (PMT-). Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik dapat ditinjau dari *outcomes* atau proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidak tercapainya tujuan yang ingin diraih. Tujuan kebijakan yang tercapai dapat dilihat dari dampak dan efeknya pada masyarakat baik secara kelompok maupun individu, serta dapat dilihat pada tingkat perubahan yang terjadi atas penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Tercapainya tujuan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana perubahan serta penerimaan oleh masyarakat.Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang disertakan praktek mengolah makanan. Tingkat daya tanggap masyarakat Desa Glingseran terbilang bagus, hal tersebut dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi dan pemahaman masyarakat dalam menerima materi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Wringin beserta bidan wilayah Desa Glingseran.

Daftar Referensi

Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.

Bungin, B. (2011). *PENELITIAN KUALIITATIF Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Ke-5). Kencana.

Daniel A. Mazmanian, P. A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*. Haper Collins.

Donald P. Warwick, Theodore Reed, dan M. M. (1979). *A Theory of Public Bureaucracy: Politics, Personality, and Organization in the State Department*. Harvard University Press.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik*. Gajah Mada University Press.

Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo.

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy Fiteenth Edition*. Pearson.

George C. Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Gunn, H. and. (2003). *Kebijakan Publik*. Balai Pustaka.

Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF* (H. Sazali (ed.); Pertama). Wal Ashri Publishing.

Horn, D. V. M. dan C. Van. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Frameork Administration and Society 6*. Sage.

Jayani, D. H. (2021). Proyeksi Jumlah Balita Penderita Stunting di Dunia Menurut Kawasan (2000 & 2020).

Kemenkes. (2017). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*.

Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy : Politics, Analysis, and Alternatives*. CQ Press.

M.B. Miles, A.M. Huberman, dan S. J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.

Menteri Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2019). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019* (16 Tahun 2018).

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Parsons, W. (2006). *Public Policy : an introduction to theory and practice of policy analysis* (1st ed.). Kencana.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. ALFABETA.

Sukirno, R. (2019). Kesabaran Ibu Merawat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Journal of Psychological Perspective, 1(1), 1-14.Retrievedfrom https://www.ukinstitute.org/journals/jopp/article/v iew/joppv1i101

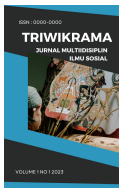

Supriyantoro. (2022, June 28). Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah. Narasi Tunggal.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, *6*.